

## **By Community Assistance On The Development Of Salt Farmers In Jeneponto Regency**

**ST. Arphina Bahar<sup>1</sup>, St. Aisyah BM<sup>2</sup>**

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail:

[arfinabahar05@gmail.com](mailto:arfinabahar05@gmail.com)

[sittiaisyah@uin-alauddin.ac.id](mailto:sittiaisyah@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract:** *Community assistance in an effort to develop salt farmers' businesses lies in the concept of community assistance that is applied. This type of research is a qualitative research that uses descriptive analysis method where empowerment in this research is carried out through a sociological approach from various series of activities such as observation, interviews and documentation. And supported by various sources of primary data and secondary data. The results of this study indicate that: 1) Community assistance strategies in efforts to develop salt farmers' businesses in Jeneponto district are broadly divided into four aspects, namely cooperation between the sub-district government and farmer groups, strengthening capital and human resources, developing marketing, and strengthening potential salt farming. 2) The impact of community assistance by farmer groups in the effort to develop salt farmers' businesses in Jeneponto district, salt farmers are able to grow and develop more independent salt farmer groups, the development of human resources, one of which is in terms of knowledge, but in terms of technological capabilities and increasing economic level not running optimally.*

**Keywords:** *Community Assistance, Salt Farmer Business Development*

### **A. PENDAHULUAN**

Kegiatan menjalankan suatu usaha tidaklah mudah, karena menjalankan usaha ibaratnya memadukan antara ilmu dan seni. Usaha atau bisnis dipandang sebagai usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktu. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis, baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu kegiatan utama dalam bisnis adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan salah satu

kegiatan bisnis yang tidaklah mudah. Kegiatan pengembangan usaha sangat tergantung dengan kemampuan dan keilmuwan yang dimiliki para pengusaha. Pengembangan usaha suatu bisnis merupakan upaya dalam mengembangkan skala bisnis, bentuk kerja sama bisnis, serta pengembangan tenaga kerja yang dimiliki suatu bisnis. Di daerah pedesaan, kategori bisnis sangat identik dengan bisnis pertanian, perikanan, dan peternakan.

Di kabupaten Jeneponto, salah satu komoditas utama para pengusaha adalah garam. Produksi garam di Kabupaten Jeneponto dilakukan oleh para petani Garam

yang diproduksi secara tradisional. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Sulkaf S Latief sebelumnya mengatakan pihaknya akan memfokuskan pengembangan usaha garam rakyat sebagai salah satu prioritas program. “Ada empat kabupaten sentra produksi garam di Sulsel yaitu Takalar, Jeneponto, Selayar dan Pangkep”. Pemerintah, juga sudah siap memfasilitasi. Apalagi tujuan dari pembangunan pabrik garam itu untuk menjaga produksi dan ketersediaan garam di tanah air. Kemenko Maritim bersama kementerian lain juga rencana meninjau lahan tersebut. Tanah tersebut juga dalam keadaan terlantar dan pemerintah siap memperbaiki. (Berita Satu, 2021). Garam menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang kedudukannya tidak kalah penting jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya, mengingat peran dan fungsi yang dimilikinya. Selain berfungsi sebagai bahan pangan, garam juga berfungsi sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri. Sebagai bahan pangan yang mengandung unsur mineral yang dibutuhkan oleh manusia, Sodium dan Klor (NaCl), keberadaan garam tentu mutlak diperlukan di tiap rumah tangga masyarakat. Sementara sebagai bahan baku industri, garam menjadi bahan baku penting bagi industri makanan olahan, industri kimia atau farmasi, industri penyamakan kulit dan industri pengeboran minyak. Melihat peran esensial garam bagi konsumsi rumah tangga yang menyangkut ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional serta fungsi sebagai bahan baku bagi industri di dalam negeri, tidak heran apabila garam kemudian juga dijuluki sebagai salah satu “komoditas politik”. (Eriawan Rismana and Nizar, 2014)

Garam bukan hanya sebagai komoditas strategis, garam juga merupakan komoditas politik di Indonesia bahkan sejak zaman Kolonial Belanda. Komoditas politik karena menyangkut kepentingan bangsa, komoditas strategis karena semua orang

mengkonsumsinya. Sebagai bukti bahwa garam komoditas strategis dan politik dalam sejarah, tahun 1813 Raffles menyelenggarakan monopoli garam di seluruh daerah kekuasaannya, baik produksi maupun distribusi. Hal itu mengingat peran esensial garam baik sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat maupun kebutuhan untuk industri. Akibatnya, garam merupakan salah satu komoditas strategis yang sarat dengan campur tangan pemerintah. Di Indonesia, garam digunakan bukan hanya untuk konsumsi langsung rumah tangga sebagai salah satu kebutuhan pokok dan juga untuk kebutuhan diet. Garam juga banyak digunakan untuk industri yang meliputi industri kimia, industri aneka pangan, industri farmasi, industri perminyakan, dan juga untuk industri penyamakan kulit. Garam diklasifikasikan sebagai garam konsumsi dan garam industri di Indonesia. Klasifikasi garam sebagai garam konsumsi dan garam industri ini didasarkan pada kandungan zat kimia yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. Garam konsumsi misalnya mensyaratkan kandungan NaCl minimal 94%, sementara garam untuk diet mensyaratkan kandungan NaCl maksimal 60%. (Zamroni Salim and Ernawati Munadi, 2016).

Garam untuk kebutuhan industri, kualitas garam yang diperlukan juga sangat bervariasi, misalnya industri kimia memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 96%, industri makanan dan minuman memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%, serta industri farmasi memerlukan garam dengan kandungan NaCl yang lebih tinggi lagi yaitu minimal 99,8%. Industri perminyakan memerlukan garam dengan kandungan NaCl yang sedikit lebih rendah yaitu minimal 95%, serta industri water treatment dan penyamakan kulit memerlukan garam dengan kandungan NaCl yang lebih rendah yaitu 85%. Selain garam dengan kualitas

kadar NaCl yang tinggi, kualitas garam lain yang dipersyaratkan oleh industri adalah batas maksimal kandungan logam berat seperti kalsium dan magnesium yang tidak boleh melebihi 400 ppm untuk industri aneka pangan, ambang batas maksimal 200 ppm serta kadar air yang rendah untuk industri *chlor alkali plan*. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2015), produksi garam nasional pada tahun 2015 mencapai 2,84 juta ton. Sebanyak 2,5 juta ton diproduksi oleh garam rakyat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi, dan sisanya berupa garam industri yang diproduksi PT. Garam. Dengan total produksi garam pada tahun 2013 sebesar 1,09 juta ton, posisi Indonesia dibandingkan dengan negara produsen utama garam dunia hanya berada ada urutan ke-36 dengan tiga negara yang mendominasi produsen garam dunia pada tahun 2013, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pangsa mencapai lebih dari 25%, Amerika Serikat sebesar 15%, dan India 6% (USGS, 2013). Di sisi lain, akibat peningkatan jumlah penduduk dan industri, kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat, dari hanya 2,7 juta ton pada tahun 2007 meningkat menjadi 3,75 juta ton pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 647,6 ribu ton (17,3%) merupakan kebutuhan garam konsumsi dan 3,1 juta ton (82,7%) merupakan garam industri (BPS, 2015). Ironisnya kebutuhan industri yang memerlukan garam dengan kualitas tinggi, yaitu dengan kandungan NaCl lebih dari 95% mencapai 61,5%. (Adila Putri, Yusril Ihza Satria, 2020). Dari jumlah kebutuhan garam dengan kualitas tinggi yang mencapai 61,5% tersebut, hanya sekitar 31% yang bisa dipenuhi oleh kebutuhan garam yang dihasilkan di dalam negeri. Hal itu terlihat dari data KKP (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas garam lokal yang dihasilkan, khususnya oleh petambak garam (garam rakyat) tidak seragam sehingga penjualan

garam petani tambak juga digolongkan kedalam beberapa kelas sesuai dengan kualitasnya. Kualitas pertama (KW1) adalah garam dengan tingkat NaCl antara 95%-98%, kualitas kedua (KW2) mengandung NaCl antara 90%-95%, dan kualitas ketiga (KW3) berkadar NaCl kurang dari 90%. Dari total produksi nasional yang mencapai 2,84 juta ton pada tahun 2015, jumlah produksi garam rakyat yang masuk dalam kategori KW1 baru mencapai 31,04%. Dengan demikian, dengan asumsi bahwa kebutuhan garam industri yang mencapai lebih dari 80%, maka masih terbuka peluang pasar sebesar 50% bagi petani garam lokal jika petani garam bisa memproduksi garam yang bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. (Kemenperin, 2021),

Ada banyak faktor yang diperkirakan berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas garam di Indonesia. Pertama, teknik produksi dan peralatan yang digunakan masih sangat tradisional serta produksi garam yang sangat bergantung pada cuaca yang secara umum hanya memungkinkan memproduksi garam hanya dalam waktu 4 bulan. Masa produksi ini jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan Australia yang iklimnya memungkinkan untuk memproduksi garam hingga 8 bulan sehingga menghasilkan garam yang jauh lebih banyak dengan kualitas tinggi. Produksi garam di Indonesia sebagian besar juga merupakan produksi garam rakyat dengan luas areal rata-rata sebesar 0,5-3 hektar dengan letak yang terpencar-pencar. Kondisi ini menyulitkan pengembangan garam dalam skala besar yang terintegrasi dan efisien yang membutuhkan kesatuan lahan datar yang cukup luas yaitu antara 4 ribu hingga 6 ribu hektar sehingga mendapat manfaat dari skala ekonomi. Faktor lain juga usaha garam hanyalah merupakan mata pencaharian musiman, di mana petani garam seringkali hanya memanfaatkan waktu jeda pada usaha tambak udang sehingga usaha

garam rakyat belum dilakukan secara optimal. (Rismana dan Pengkajian, 2014). Kabupaten Jeneponto sebagai daerah penghasil garam yang Fokus penelitian ini adalah pendampingan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha petani garam di Kabupaten Jeneponto. Pendampingan masyarakat dalam hal ini penulis sebagai pendamping berupaya dalam memfasilitasi petani garam baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun materi guna mencapai pengembangan usaha petani garam. Selain bertindak sebagai fasilitator, bentuk pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan penulis juga dengan berkontribusi dalam pembinaan masyarakat guna mencapai pengembangan kemampuan petani garam baik dari aspek produksi, pemasaran, dan penjualan. Berdasarkan hal tersebut maka masalah penelitian tentang strategi pendampingan masyarakat oleh kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha petani garam di Kabupaten Jeneponto

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pendampingan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. (Gunawan Sumodiningrat, 2013). Dalam proses pendampingan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pendampingan masyarakat ini kemudian

pada pendampingan ekonomi rakyat. (Sayu Ketut Sutrisna Dewi, 2017). Pendampingan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatankegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bawa program pendampingan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dalam upaya pendampingan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (Sri Handiri, 2019). Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pendampingan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang

(*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

a. Memberdayakan Mengandung Pula Arti Melindungi.

Proses pendampingan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pendampingan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendampingan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pendekatan utama dalam konsep pendampingan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Selanjutnya menurut Teori Stimulus Respon (S-R) yang mendefinisikan pelatihan merupakan suatu proses menciptakan kondisi dan stimulus untuk menimbulkan respons sehingga pengetahuan, keterampilan atau skill dan sikap dapat berkembang serta menciptakan perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan spesifik. Dalam teori stimulus respon terdapt unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur tersebut adalah pesan (*stimulus*), komunikan (*Organism*) dan efek (*Respon*). Masing-masing unsur memiliki pengertian sebagai berikut: (Citra Dwi Palenti, 2020)

b. Pesan (*stimulus*, S):

Pesan atau message merupakan elemen penting dalam komunikasi. Sebab pesan merupakan pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh kemunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi publik,

pesan bernilai sangat besar. Karena inilah yang menjafi inti dari terjalannya komunikasi. Tanpa adanya pesan maka kamunikasi baik antara komunikator dan komunikan tidak akan dapat berjalan.

c. Komunikan (*Organism*)

Perhatian, pengertian, penerimaan Komunikan merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimukus yang diteria akan berbeda-bea. Tergantung kepada masing-masing pribadi menyikapi bentuk stimulus tersebut. Dalam mempelajari sikap ada tiga variabel yang penting menunjang proses belajar tersebut yaitu: perhatian, pengertian, penerimaan. Ketiga variabel imi menjadi penting sebab akan menentukan bagaimana kemudian respon yang akan diberikan oleh komunikan setelah menerima stimulus.

d. Efek (*Respon*, R)

perubahan sikap menurut Hosland, mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar.

2. Proses Pendampingan

Proses pendampingan mengandung dua kecenderungan dalam proses pendampingan masyarakat: (Bambang Sugeng Dwiyanto 2013) a). Pertama, kecenderungan primer yaitu proses pendampingan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. b). Kecenderungan sekunder yaitu proses yang menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, tetapi yang sering terjadi adalah kecenderungan primer berjalan

terlebih dulu untuk mendukung kecenderungan sekunder. .

### 3. Strategi Pendampingan Masyarakat

Pendampingan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pendampingan tidak sekedar menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pendampingan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja beragam walaupun dalam satu komunitas. (Putri Erika Ramadhani 2020). Strategi pendampingan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepadamasyarakat seluasluasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pendampingan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pendampingan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.

Masyarakat juga sangat heterogen. Oleh karena itu tanggapan, penerimaan dan pelaksanaan kegiatan pendampingan tentu akan berbeda. Dengan disebarluaskan kepada berbagai masyarakat, pada akhirnya akan terjadi proses penyesuaian. Keberhasilan juga akan beragam. Dalam gerakan masyarakat, model dan strategi pendampingan tidak bisa diseragamkan. Hal ini disesuaikan dengan potensi, kebutuhan

dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi pendampingan masyarakat yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan.

### 4. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah suatu proses pelaksanaan usaha mengenai peluang pertumbuhan potensial selama usaha itu berlangsung. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, eknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategi melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi/divestasi teknologi, produk, dan lain-lain. (Sutoni dan Randany, 2020). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa: a). Usaha Mikro. Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. b). Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. c). Usaha Menengah. Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### 5. Strategi Pengembangan Usaha

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memfasilitasi usaha. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan pasal 17 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah. Yang dimaksud dengan kemampuan rancang bangun adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

### 6. Model Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: Perluasan Skala Usaha Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha, Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek. Sebagaimana dikutip oleh Husein Umar "*Strategic In Action*". Menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas empat kelompok strategi, yaitu: Strategi Integrasi Vertikal (*Vertical Integration Strategy*), Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan/atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi atau membuat perusahaan sendiri. Strategi Intensif (*Intensive Strategy*). Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*). Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan

manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Strategi Bertahan (*Defensive Strategy*). Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujungujungnya adalah kebangkrutan.

### C. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara penelitian dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif dianggap tepat untuk mengkaji perilaku pencarian informasi, karena; Adapun sumber dalam penelitian ini adalah : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek dengan menggunakan wawancara terhadap informan yang sesuai dengan fokus peneliti yang penulis teliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang meliputi: Informan atau subjek penelitian yang ada. Data yang berwujud dokumenter, yang terbentuk kajian pustaka, berkas-berkas, catatan-catatan tertulis, dan bagan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini (2009). Menurut Patton (dalam Sugiyono, 2018)

dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan eksplisit. Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Menurut Bogdan analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Terdapat beberapa tahap dalam analisis data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif Huberman dan Miles yaitu: (Sugiyono, 2019). Kategorisasi dan Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

#### D. PEMBAHASAN

Strategi pendampingan masyarakat oleh kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha petani garam. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk strategi pendampingan yang dilakukan kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha petani garam di kabupaten Jeneponto.

1. Kerjasama antar pemerintah kelurahan dengan kelompok tani

Jika melihat Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga membahas tentang partisipasi dan kemandirian masyarakat, terdapat konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi. Konsep pendampingan masyarakat sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “*civil society*” akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. namun friedmann juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar “*civil society*” diabaikan. oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional. Penelitian ini memiliki lima informan yaitu kepala Kelurahan Pallengu, ketua kelompok tani, dan kelompok tani yang terdiri dari tiga orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pallengu bapak Kaharuddin S. Sos mengenai peran pemerintah dalam pengembangan usaha petani garam di Kelurahan Pallengu, diketahui bahwa

pemerintah Kelurahan Pallengu beserta tim pendamping menjalankan tugas dan fungsinya dengan mensosialisasikan tujuan dari setiap program yang ingin direalisasikan agar setiap kelompok dapat memahami dan bekerjasama untuk merealisasikan program-program yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah. Selanjutnya hasil wawancara Ketua Kelompok Tani Kelurahan Pallengu memfokuskan pada strategi pendampingan usaha petani garam serta kegiatan pendampingan petani garam. Pendampingan ditujukan untuk memahami dan merealisasikan program-program yang ada agar dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pendampingan tidak sekedar menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pendampingan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja beragam walaupun dalam satu komunitas. (Ramadhani and Mulyana, 2019). Dalam hal strategi pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan petani usaha garam yakni membuat struktur kelompok petani garam hal itu dilaksanakan agar proses pembinaan bisa berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan, selain itu dengan terbentuknya kelompok tani garam maka pemerintah dalam hal pendamping melakukan sosialisai berupa pengenalan tujuang dengan adanya program ini hal itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok tani garam.

## **2. Penguatan Permodalan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Menyangkut strategi penguatan permodalan dan peningkatan SDM maka pihak pemerintah mengadakan musyawarah sebagai teknik pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai sudut

pandang dalam aktivitas kelompok demi tercapainya visi dan misi kelompok tani tersebut. Pendekatan tersebut dilanjutkan dengan dilakukannya pengelompokan kelompok tani kemudian memastikan setiap kebutuhan kelompok tani baik dari aspek pengembangan dan permodalan. Tercapainya pertemuan kedua belah pihak, pemerintah dalam hal ini pendamping dapat memahami kebutuhan-kebutuhan dari kelompok tani garam agar anggaran bisa bermanfaat bagi setiap kelompok dalam meningkatkan hasil garam. Mengenai aspek fungsi kelompok tani, strategi pendampingan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha petani garam yaitu; secara garis besar terbagi atas dua yakni peningkatan sumber daya manusia dan bantuan permodalan oleh pemerintahan Kelurahan. Selanjutnya dalam proses pendampingan dilakukan dengan mengkoordinir antara perangkat Kelurahan, kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Proses berdampingan diikuti dengan pemberian materi pelatihan yang dilakukan secara bergiliran. Dalam proses pendampingan, kelompok tani mengelompokkan para anggota kemudian memetakan kebutuhan-kebutuhan para petani dari aspek pengembangan usaha. Mengenai strategi pendampingan, dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dengan para anggota kelompok tani mengenai masalah-masalah usaha dan membantu memecahkan masalah tersebut. kDalam pengembangan usaha petani garam diketahui bahwa program bimbingan permodalan dan peningkatan SDM petani garam adalah kegiatan seminar pelatihan dan kewirausahaan. Strategi pemberdayaan tersebut tercermin dalam pengembangan kompetensi para petani garam. Mengenai respon dan antusiasme yang ditunjukkan para petani garam cukup baik, hal tersebut dilatarbelakangi pangsa pasar yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan untuk komoditas garam. Dengan adanya realisasi penguatan permodalan dan SDM

sangat memberikan dampak bagi kelompok petani garam. Dampak kegiatan pendampingan petani garam oleh kelompok tani dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok tani yang dibentuk dapat memberikan dampak sebagai wadah kelas belajar serta wahana kerjasama antara satu petani dengan petani lainnya. Perubahan yang ingin dicapai dalam program pendampingan yaitu peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan usaha. Selanjutnya hasil wawancara mengenai kendala yang dihadapi kelompok kelompok tani dalam upaya peningkatan kesadaran dan kemandirian anggota tani. Mengenai kendala yang disampaikan Ikhsan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dewasa ini lebih mengarah ke arah besaran anggaran yang dikelola kelompok tani yang tidak mencakup semua anggota jadi berakibat tidak semua kelompok tani menerima anggaran bantuan tersebut. Sedangkan, kendala dalam kegiatan pendampingan secara garis besar tidak menemukan kendala yang berarti.

### 3. Sistem Pemasaran Dengan Ruang Lingkup yang Lebih Luas

Dalam memperluas cakupan lebih luas maka perlu adanya pengembangan kompetensi para petani garam terkhususnya aspek pemasaran, penjualan, dan pengemasan. Strategi pendampingan usaha petani garam dan dampak kegiatan pendampingan petani garam, produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan, sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan, perluasan cakupan usaha, perluasan kerja sama. Terealisasinya pelatihan dan seminar pihak pendamping mengupayakan agar penjualan hasil panen garam meningkat itu harus terlibat dalam modernisasi, seperti mampu mencakup jaringan lebih luas dan akan berdampak pada penjualan hasil pertanian garam. Namun,

pemanfaatan modernisasi belum terealisasi dengan maksimal sehingga beberapa kelompok tani menjualnya dengan cara terjun langsung kelapangan (*offline*). Realisasi pemanfaatan lewat jalur *online* belum berjalan maksimal sehingga kelompok tani berinisiatif untuk melakukan pemasaran lewat *offline* dengan cara menjualkan hasil panennya di pinggir jalan ditempat yang telah disediakan oleh setiap anggota kelompok tani.

### 4. Memperkuat Potensi Yang Dimiliki Oleh Usaha Petani Garam

Strategi selanjutnya dilakukan yaitu dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh usaha petani garam dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat, realisasi bantuan berupa fasilitas dalam hal bertani garam dan bantuan modal untuk meningkatkan kebutuhan lain- lain dalam memproduksi garam. Dengan adanya program ini bukan hanya fasilitas keperluan bertani yang didapatkan namun dalam hal segi pengetahuan seperti halnya penentuan harga penjualan, dengan adanya program manfaat yang telah didapatkan cukup banyak mulai fasilitas sampai dengan cara memasarkan produk. Strategi kelompok tani bersama pemerintah kelurahan Pallengu yaitu memperkuat potensi yang dimiliki petani garam dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Menurut para informan penelitian, strategi tersebut cukup memberikan hasil positif kecuali di aspek produksi karena produksi garam juga menyangkut atau bergantung pada keadaan cuaca lingkungan sekitar. Selanjutnya, menurut para informan strategi pendampingan yang dilakukan oleh kelompok tani bersama dengan pemerintah kelurahan cukup memberikan andil dalam pengembangan kemampuan/kompetensi mereka baik dari *soft skill* dan *hard skill*.

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Strategi pendampingan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha petani garam

secara garis besar terbagi atas empat aspek yaitu kerjasama antar pemerintah kelurahan dengan kelompok tani, penguatan permodalan dan sumber daya manusia, membangun pemasaran, dan memperkuat potensi usaha petani garam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Berita Satu. (2021). Pemerintah Jadikan Sulsel Pusat Produksi Garam. Retrieved June 30, 2021, from <https://www.beritasatu.com/archive/446948/pemerintah-jadikan-sulsel-pusat-produksi-garam>.
- Dewi, S. K. S. (2017). *Konsep Dan Pengembangan Kewirausahaan Di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., III(1), 36–61*.
- Gumanti, S., Juniah, R., Taqwa, R., Daerah, P., Prahastutiningtyas, Y., Disemadi, H. S., Universitas, T. (2016). Pendampingan Strategi Pengembangan Usaha pada UKM Batik Kontemporer di Semarang. *Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 362–367*.
- Handiri, S., Sukesi, & Astuti, H. K. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa: Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hasni. (2022). *Hasil Wawancara Anggota Kelompok Tani*. Kabupaten Jeneponto.
- Ihsannudin, Pinujib, S., Subejo, & Bangko, B. S. (2013). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. *Economics Development Analysis Journal, 2(4), 446–455*.
- Ikhsan. (2022). *Hasil Wawancara Ketua Kelompok Tani*. Kabupaten Jeneponto.
- Iskandar. (2022). *Hasil Wawancara Anggota Kelompok Tani*. Kabupaten Jeneponto.
- Kaharuddin. (2022). *Hasil Wawancara Lurah Kelurahan Pallengu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan*. Kabupaten Jeneponto.
- Kemenag. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kemenperin. (n.d.). Kemenperin Dukung Target Penyerapan Garam Lokal Hingga 1,5 Juta Ton di 2021. Retrieved January 20, 2022, from <https://kemenperin.go.id/artikel/22372/Kemenperin-Dukung-Target-Penyerapan-Garam-Lokal-Hingga-1%2C5-Juta-Ton-di-2021>
- Nurullah, I. Z., Aliyudin, & Aziz, A. (2017). *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Motekar Pengrajin Anyaman Bilik*. 2, 1–19.
- Palenti, C. D., Prasetyo, I., & Gusti, R. (2020). Pendampingan Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata melalui Pemetaan Kebutuhan. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 4(1), 11–20*. <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i1.27551>
- <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1647>
- Putri, S. N., Satria, Y. I., & Hendrianie, N. (2020). *Pra Desain Pabrik Garam Industri dari Garam Rakyat*. 9(2).
- Rahmatia. (2022). *Hasil Wawancara Anggota Kelompok Tani*. Kabupaten Jeneponto.
- Ramadhani, P. E., & Mulyana, N. (2020). Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Di Desa Lebakagung

- Kecamatan Karangpawitan  
Kabupaten Garut). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 64.  
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27049>
- Rismana, E., & Nizar. (2014). Kajian Proses Produksi Garam Aneka Pangan Menggunakan Beberapa Sumber Bahan Baku. *Chemistry Progress*, 7(1), 58–61.  
<https://doi.org/10.35799/cp.7.1.2014.4851>
- Salim, Z., & Munadi, E. (2016). Info Komoditi Garam. In *Al Mawardi Prima*.
- Suardana, G. (2020). *Inovasi Produk Olahan Garam & Pemasarannya*. Badung: Bintang Pustaka Madani Yogyakarta.
- Sudjinar, S., & Juwari, J. (2018). Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan Umkm Dan Koperasi Di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi [J.A.M.I.E.]*, 1(1), 40–49. Retrieved from <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Edisi Ke-3). Bandung: Alfabeta. CV.
- Sumodiningrat, G. (20013). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Scenter.litpam.com/index.php/linov
- Sutoni, A., & Randany, M. R. (2020). Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kualitas Produk di Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(2), 127–134. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/991/781>
- Syafaruddin. (2016). *Pendidikan & Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing.